

# BAB I PENDAHULUAN

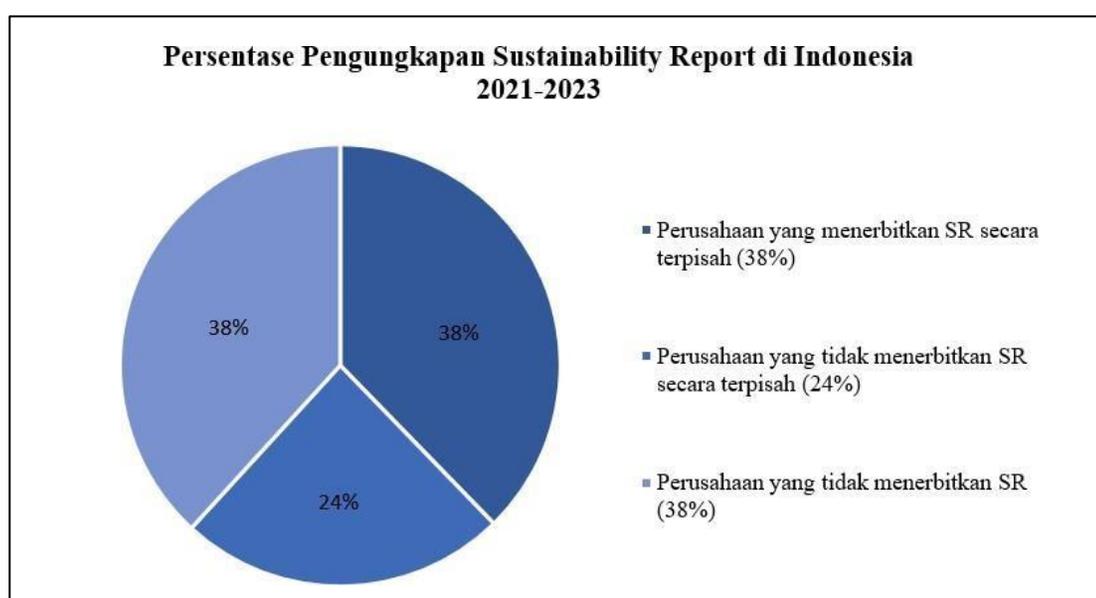
## 1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin nyata menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari setiap aktivitas bisnis yang dijalankan. Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan kini menjadi komponen krusial dalam evaluasi kinerja perusahaan. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pelaporan keuangan yang berfokus pada aspek finansial semata, tanpa mengintegrasikan dimensi keberlanjutan secara holistik. (Pamungkas *et al.*, 2024).

Mulai dari awal tahun 2016 hingga akhir tahun 2030, seluruh negara di dunia telah menyepakati penerapan konsep pembangunan berkelanjutan secara global, yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesepakatan ini dihasilkan melalui pembahasan dan penetapan oleh hampir semua anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Indonesia turut bergabung sebagai salah satu negara yang berkomitmen bersama komunitas internasional untuk mewujudkan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs. Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* merupakan dokumen yang disusun oleh perusahaan guna mengungkapkan kinerja serta dampak dari aktivitasnya terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, laporan ini juga menguraikan kontribusi perusahaan atau organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (Apriliyani *et al.*, 2021).

Tujuan dari *sustainability report* ialah untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana aktivitas perusahaan mempengaruhi lingkungan dan masyarakat, serta untuk menilai risiko dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, serta perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan mereka. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan mengubah pelaporan sustainability report yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi suatu

kewajiban bagi perusahaan. Selain itu, OJK juga mengeluarkan Surat Edaran SEOJK Nomor 16 Tahun 2021 yang memberikan pedoman teknis dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan bagi emiten dan perusahaan publik, guna menegaskan pentingnya penyampaian laporan keberlanjutan tersebut. Meski demikian, masih terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang belum mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan oleh Gambar 1.1 yang menunjukkan persentase pengungkapan *sustainability report* di Indonesia.

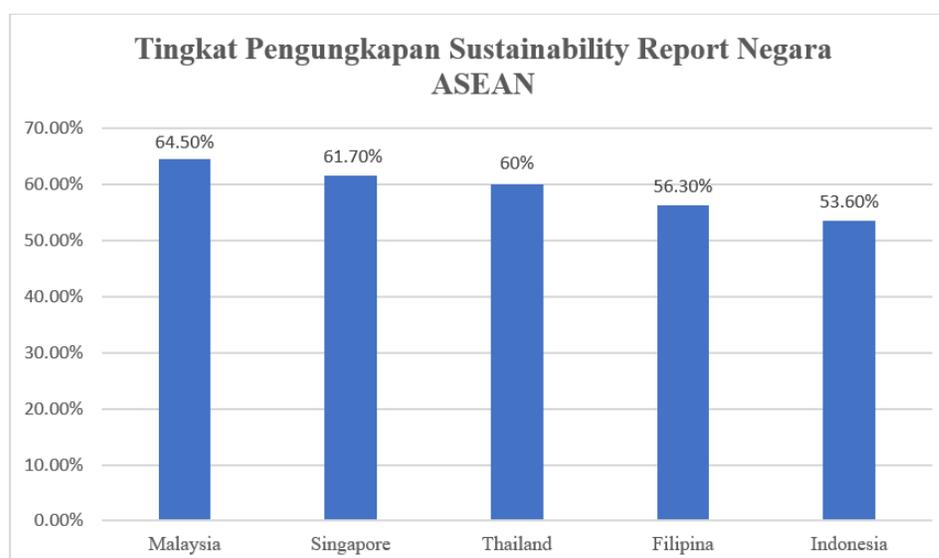


Gambar 1. 1 Pengungkapan Sustainability Report di Indonesia

Sumber : Bursa Efek Indonesia, Data Diolah 2024

Pada periode 2021 hingga 2023, sebanyak 767 perusahaan terbuka di Indonesia yang aktif secara operasional telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tercatat sebagai perusahaan *go public*. Berdasarkan data yang diperoleh melalui situs resmi masing-masing perusahaan, hanya 288 perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability report* sesuai dengan ketentuan POJK. Sementara itu, sebanyak 186 perusahaan masih mengintegrasikan *sustainability report*-nya dengan laporan tahunan mereka, dan 293 perusahaan belum menerbitkan *sustainability report*. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan perusahaan tentang pentingnya pelaporan keberlanjutan. Padahal, laporan keberlanjutan tidak hanya menjadi kewajiban, melainkan menjadi media untuk mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan (Yuliandhari *et al.*, 2023). Di samping itu, rendahnya tingkat pengungkapan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN

ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Pengungkapan Sustainability Report Negara ASEAN

Sumber : Oktapiani (2024)

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengungkapan *sustainability report* di negara-negara ASEAN berdasarkan penelitian Oktapiani, (2024). Pada grafik tersebut digambarkan bahwa tingkat pengungkapan tertinggi dipimpin oleh Malaysia dengan persentase 65% lalu disusul oleh Singapura dengan 62%, di peringkat ketiga adalah Thailand dengan 60% dilanjutkan Filipina dengan persentase 56% dan yang menempati posisi terakhir merupakan Indonesia dengan 54%. Indonesia dan Filipina merupakan negara yang mendapatkan persentase dibawah rata rata, dengan rerata keseluruhan negara ASEAN adalah 59,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan di Indonesia masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia masih belum sepenuhnya menyadari pentingnya mempublikasikan laporan keberlanjutan, sehingga informasi komprehensif mengenai kinerja perusahaan kurang dapat diakses oleh masyarakat luas dan investor.

Dalam mewujudkan target dan sasaran dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2030, menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia yang peduli dan masuk dalam kategori “korporasi hijau” dan aktif melakukan kegiatan tanggung jawab sosial (Sayekti, 2024). Dalam hal ini, akuntansi hijau (*green accounting*) menjadi salah satu upaya strategis untuk mendukung pencapaian SDGs. *Green accounting* merupakan suatu metode

pengukuran, pencatatan, pelaporan, pengakuan serta ringkasan yang diungkap pada suatu peristiwa dengan integrasi yang tinggi sehingga dapat memberikan hasil berupa sebuah informasi akuntansi keuangan, lingkungan, serta sosial yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan ekonomi maupun non-ekonomi (Lako, 2018:5). Selain itu, penerapan *green accounting* dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan industri hijau dan mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan biaya lingkungan yang efektif serta program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada kesejahteraan lingkungan sekitar (Melenia *et al.*, 2023).

Maraknya kasus pencemaran di Indonesia menunjukkan rendahnya kepatuhan beberapa perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Pada tahun 2023, *World Bank* mencatat jumlah emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) di Indonesia telah mencapai angka 674,5 ton. Adapun angka ini mencakup perhitungan emisi yang berasal dari sektor pertanian, energi, limbah, dan industri (World Bank, 2023). Di samping itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di tahun 2024, menyatakan bahwa total timbulan sampah di Indonesia mencapai sekitar 33,79 juta ton, dengan sekitar 11,3 juta ton sampah tidak terkelola dengan baik (BPS, 2024). Hal tersebut menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pelaku industri untuk mengalokasikan biaya operasional lingkungan secara memadai sebagai wujud implementasi dari *green accounting*. Biaya tersebut mencakup pengeluaran untuk pengolahan limbah, pengendalian emisi, pemantauan kualitas lingkungan, serta pemenuhan standar lingkungan hidup yang ditetapkan pemerintah. Melalui pengalokasian biaya operasional lingkungan, perusahaan dapat menekan tingkat pencemaran serta mendukung terciptanya industri yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Selain mengalokasikan biaya operasional lingkungan, perusahaan juga perlu memberikan perhatian pada biaya penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari strategi *green accounting* dalam mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Biaya ini berfokus pada inovasi ramah lingkungan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan teknologi baru yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan minim dampak terhadap lingkungan. Menurut penelitian Sintadevi *et al* (2024) melalui penerapan inovasi dan strategi hijau, perusahaan cenderung memiliki pengungkapan *sustainability report* yang lebih komperhensif. Hal ini

disebabkan karena investasi dalam penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada lingkungan mendorong perusahaan untuk lebih memahami dan mengelola dampak ekologis dari operasional mereka.

Selanjutnya, pendekatan *green accounting* juga dapat diimplementasikan melalui penerapan biaya daur ulang. Biaya ini mencakup pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mengelola limbah pasca-konsumsi, termasuk proses pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan ulang produk agar dapat digunakan kembali atau dibuang secara bertanggung jawab. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK), Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahunnya. Maka dari itu, penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) digalakkan oleh pemerintah untuk mendorong produsen agar bertanggung jawab atas siklus hidup produknya, sampai dengan tahap akhir penggunaannya. Dengan mengalokasikan dan mengungkapkan biaya daur ulang produk, perusahaan tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi limbah dan pencemaran, tetapi juga menunjukkan akuntabilitasnya kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan ini juga dapat menjadi aspek penting dalam pengungkapan *sustainability report*, karena mencerminkan sejauh mana perusahaan mengintegrasikan prinsip ekonomi dan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnisnya secara menyeluruh.

Penerapan *green accounting* melalui pengalokasian biaya operasional lingkungan, biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya daur ulang merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi perusahaan di Indonesia dalam menunjukkan komitmen nyata mereka terhadap penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Ketiga indikator tersebut tidak hanya mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan secara efektif, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dalam *sustainability report*. Dengan menerapkan *green accounting*, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai informasi terkait dampak lingkungan secara lebih sistematis ke dalam laporan keberlanjutan mereka (Zik-Rullahi & Jide, 2023). Pengungkapan yang lebih komprehensif ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, pengelolaan *green accounting* menjadi salah satu aspek

kunci yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas lingkungan (Ambarsari *et al.*, 2024).

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan, tekanan dari para pemangku kepentingan turut memperkuat urgensi penerapan *green accounting* dalam praktik bisnis perusahaan. Tidak hanya sebagai alat evaluasi internal, *green accounting* juga menjadi sarana penting untuk memenuhi ekspektasi eksternal, terutama dari investor, konsumen, dan masyarakat yang semakin menuntut transparansi dan tanggung jawab atas dampak lingkungan (Putri *et al.*, 2024). Hal ini dibuktikan oleh adanya peningkatan minat investasi yang mengedepankan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa permintaan investor terhadap produk investasi ESG terus meningkat, dan ESG kini menjadi aspek esensial dalam pengambilan keputusan investasi (Rangkuti *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham yang berorientasi pada keberlanjutan cenderung memberikan tekanan agar perusahaan mengungkapkan secara terbuka risiko lingkungan dan strategi mitigasinya melalui pengungkapan ESG dalam *sustainability report*.

Selanjutnya, karyawan juga menjadi salah satu *stakeholder* yang memberikan tekanan penting bagi perusahaan. Tekanan dari karyawan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tuntutan akan program tanggung jawab sosial internal kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan berkelanjutan, hingga dorongan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan di tempat kerja karena karyawan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu keberlanjutan juga cenderung menilai kredibilitas dan komitmen perusahaan melalui keterbukaan informasi dalam laporan keberlanjutan. Hal tersebut ditunjukkan oleh temuan bahwa semakin tinggi jumlah karyawan dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pengungkapan dalam *sustainability report* (Wasiatun & Anisykurlillah, 2023). Karyawan dipandang sebagai modal intelektual sekaligus *stakeholder* primer yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan operasional perusahaan (Lulu, 2020). Sehingga, perusahaan

perlu memenuhi tuntutan dan harapan karyawan, termasuk dalam hal pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan *sustainability report*.

Tidak hanya itu, adanya tuntutan dari pemangku kepentingan diluar perusahaan juga memberikan dorongan kepada perusahaan untuk selalu mengedepankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan, terutama dalam aspek sosial dan lingkungan. Dikutip dari *Media Indonesia*, kesadaran konsumen terhadap tanggung jawab lingkungan semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda, yakni milenial 85% dan generasi Z 80%. Lebih dari 73 persen konsumen menyatakan siap beralih ke produk-produk yang lebih ramah lingkungan, sementara 41 persen di antaranya menyatakan lebih memilih produk berbahan alami dan organik (Media Indonesia, 2021). Peningkatan kesadaran ini menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui penyusunan *sustainability report* yang berkualitas dan informatif. Konsumen kini tidak hanya menilai perusahaan dari produk yang dihasilkan, tetapi juga dari transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dampak lingkungan dan sosialnya (Putri *et al.*, 2024). Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang tidak hanya sebagai formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan strategi, implementasi, dan hasil nyata dari praktik bisnis yang bertanggung jawab (Akhda, 2024).

Sebagai *stakeholder* eksternal, lingkungan memiliki peran penting dalam keberlanjutan bisnis perusahaan, meskipun bukan merupakan entitas atau organisasi konvensional. Aktivitas perusahaan secara langsung memengaruhi lingkungan melalui berbagai cara, seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlanjutan operasional perusahaan itu sendiri (Surya *et al.*, 2023). Berdasarkan teori *stakeholder*, organisasi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap semua *stakeholder*, termasuk lingkungan. Penelitian Lulu (2020) menyatakan bahwa tekanan lingkungan dapat memberikan dorongan kepada perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko perusahaan akan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mengungkapkannya dalam laporan keberlanjutan, sehingga tercipta hubungan yang sehat antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Maka demikian, perusahaan perlu secara

proaktif merespons tekanan lingkungan dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Pengungkapan *sustainability report* bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga perusahaan dapat membangun reputasi yang positif, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan hubungan jangka panjang yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap kualitas *sustainability report*. Maka dari itu, menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Green accounting* dan Tekanan *Stakeholder* Terhadap Kualitas *Sustainability Report*”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan green accounting berpengaruh terhadap kualitas sustainability report?
2. Apakah tekanan investor berpengaruh terhadap kualitas sustainability report?
3. Apakah tekanan karyawan berpengaruh terhadap kualitas sustainability report?
4. Apakah tekanan konsumen berpengaruh terhadap kualitas sustainability report?
5. Apakah tekanan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas sustainability report?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh biaya operasional lingkungan terhadap kualitas *sustainability report*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait tekanan investor terhadap kualitas *sustainability report*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait tekanan karyawan terhadap kualitas *sustainability report*.

4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait tekanan konsumen terhadap kualitas *sustainability report*.
5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait tekanan lingkungan terhadap kualitas *sustainability report*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara praktis maupun akademis, di antaranya :

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perusahaan- perusahaan terbuka dalam menerapkan prinsip *green accounting* yang baik. Perusahaan diharapkan dapat mengembangkan praktik pelaporannya untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* melalui peningkatan kualitas pengungkapan *sustainability report* yang berpedoman pada standar umum *Global Reporting Initiative (GRI)*.

##### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi akademisi, khususnya dalam program studi akuntansi, untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran akuntansi lingkungan dalam mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel terhadap isu-isu keberlanjutan

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dan rujukan teori bagi penelitian selanjutnya sekaligus memberikan perspektif baru mengenai topik serupa.